

Bangunlah Maluku dari Laut

Sebuah Pergeseran Paradigma Pembangunan Yang Rasional Untuk Memantapkan Nasionalisme di Maluku

Suaidi Marasabessy

"..... tetapi ketika NKRI baru "seumur-jagung", gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) telah dideklarasikan pada 25 April 1950. Setelah itu di Maluku terjadi pemberontakan yang luas di mana kesatuan-kesatuan bersenjata bersandar teguh atas rasa kedaerahan yang kuat karena merasa diabaikan"
(Jenderal TNI (Purn) AH.Nasution, 1979).

"Di bawah laut Banda terdapat tanah yang mengandung seng, besi, nikel, perak, emas, kobalt dan magnesium yang justru tidak ada dalam kandungan tanah di daratan Maluku. Laut Banda disebut sebagai warisan dunia (world heritage), bukan saja karena kandungan air yaitu ikan, tetapi terlebih karena kandungan tanah di bawah air lautnya"

(Hans de Witte, 1984)

Pengantar

Ada banyak catatan ilmiah dan catatan sejarah tentang Maluku yang dapat digunakan sebagai landasan berpijak dalam menentukan kebijakan pembangunan di Maluku. Dua di antaranya ditampilkan dalam bentuk cuplikan kalimat tersebut di atas.

Hanya saja realitas hari ini menunjukkan bahwa catatan-catatan tersebut di atas, kurang dan bahkan tidak dimanfaatkan oleh penentu kebijakan pembangunan di Maluku untuk menghasilkan Maluku yang lebih maju.

Betapa tidak. Dengan merujuk pada dua kalimat itu saja terlihat betapa besarnya

potensi kelautan yang dimiliki oleh Maluku. Tentu saja ada juga permasalahan yang perlu dijadikan rujukan untuk bagaimana menentukan prioritas pembangunan di Maluku. Bila kalimat-kalimat tersebut benar maka mestinya membangun Maluku dari laut harus merupakan sebuah prioritas. Baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Maluku maupun untuk menghilangkan keinginan separatis sebagian rakyat Maluku karena merasa terabaikan oleh pembangunan yang selama ini terjadi di Maluku.

Permasalahan Pembangunan di Maluku

Maluku kontemporer adalah Maluku yang perlu diselamatkan. Dalam benak banyak orang, Maluku saat ini adalah Maluku yang tercitrakan secara negatif (terstigmatisasi) dan terbedakan dalam kehidupan nasional (terdiskriminasi). Ujung-ujungnya terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan (termarjinalisasi). Faktor dominannya karena persepsi kekitaan orang Maluku telah tereduksi menjadi sikap kekamian dan bahkan berlanjut menjadi kebuasan keakuan. Kondisi internal orang Maluku telah

diperlemah oleh ketiadaan hati nurani yang menjadi "ujung-tombak" penghancuran sesama orang Maluku.

Bagi orang Maluku, bukan hanya masalah nasionalisme, lokalisme pun sedang ada masalah karena sikap sektarian yang memecah identitas ke-Malukuan. Sesuatu yang ironis. Karena justru terjadi di tengah arus kuat globalisasi yang menuntut kompetensi dan kompetisi. Telah terjadi kemunduran yang sangat signifikan dan menyebabkan peta masa depan orang Maluku menjadi begitu buram. Padahal potensi yang dimiliki Maluku sungguh sangat besar.

Walaupun konflik di Maluku yang terjadi sejak 19 Januari 1999 semakin membaik dan bahkan secara umum situasi Maluku telah kondusif, tetapi tetap saja ada beberapa faktor yang perlu diselesaikan secara lebih permanen.

Fakta konflik menunjukkan bahwa ada persoalan multi dimensi dalam perikehidupan orang Maluku; baik faktor penyebab konflik maupun faktor akibat konflik; baik dalam ide, niat, semangat maupun perilakunya; baik dalam persepsi maupun implementasinya; baik yang bersifat personal mau-

pun yang bersifat komunal; baik yang beraspek fisik maupun yang psikis ; baik yang berdimensi politik, ekonomi, sosial-budaya maupun keamanan; baik terkait dengan perilaku birokrasi maupun perilaku rakyat.

Memang ada pandangan bahwa faktor utama permasalahan multi-dimensi tersebut terletak pada berbagai kebijakan negara terhadap rakyat dan daerah Maluku. Dalam hal ini terefleksikan dalam proses stigmatisasi, diskriminasi dan marjinalisasi. Tetapi hanya melalui analisis sederhana, langsung dapat dilihat bahwa proses tersebut —stigmatisasi, diskriminasi dan marjinalisasi— hanya merupakan akibat dari suatu sebab yang berasal dari dalam diri orang Maluku sendiri; sesuatu yang bersifat lokal, walaupun terkait juga dengan sesuatu yang nasional dan bahkan regional dan global. Tetapi seperti kata-kata bijak: “semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan”, maka sebaiknya orang-orang Maluku lebih baik melakukan terlebih dahulu tindakan introspeksi/mawas diri, daripada lebih cenderung menyalahkan orang luar.

Dalam konteks membangun kembali Maluku saat pasca kehancuran yang

demikian besar, orang Maluku lebih baik melakukan *inward-looking* (mawas ke dalam) daripada melakukan *outward-looking* (mawas ke luar). Walaupun *outward-looking* tidak sepenuhnya dapat ditinggalkan. *Outward-looking*, untuk sementara hanya menjadi pelengkap atau sekedar pembanding. Sebab di era transisi ke kemandirian lokal, kontemplasi (proses perenungan) masih tetap diperlukan untuk menemukan dan memperkuat kemandirian. Apalagi dalam kehidupan global, komparasi (pembandingan) tetap saja diperlukan. Setidak-tidaknya dalam rangka memperkaya ide, memperbesar niat, mempertinggi semangat, memperbaiki perilaku, memperkuat implementasi dan menjujuri realitas.

Permasalahan pada masa kini, acap kali disebabkan oleh kesalahan pada masa lalu. Kesalahan yang dapat diawali oleh kesalahan pada perumusan visi/wawasan yang berlanjut pada kesalahan penentuan misi dan strategi serta berimplikasi pada kesalahan penerapan metoda sehingga pencapaian hasil menjadi tidak maksimal.

Sudah waktunya Maluku harus mengubah dirinya. Mengutip pakar ma-

najemen Indonesia, Rhenald Kasali, Ph.D dalam bukunya *Change: "Tak peduli berapa jauh jalan salah yang anda jalani, putar arah sekarang juga"*, orang Maluku harus menumbuhkan keberanian untuk melakukan sebuah reorientasi cara berpikir dan bertindak sehingga memungkinkan terjadinya sebuah perubahan yang signifikan bagi rakyat dan daerahnya.

Sebuah perubahan yang bila dirancang, dipersiapkan, dilaksanakan dan dikendalikan dengan baik dan benar, Insya Allah akan membawa rakyat dan daerah Maluku ke keadaan yang lebih baik; keadaan yang lebih damai, aman, adil, sejahtera, bersatu dan bermartabat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kondisi Obyektif Maluku

Taufiq Ismail, dalam buku *Sejarah Maluku Banda Naira, Ternate, Tidore dan Ambon*, antara lain mengatakan bahwa ketika Christofer Columbus menemukan benua Amerika (1492) atas biaya Ratu Isabella dan Raja Ferdinand dari Spanyol, sesungguhnya yang ingin dicapai adalah *Spice Island* (pulau rempah-rempah), pe-

namaan bangsa-bangsa Eropa ketika itu terhadap segugusan pulau yang saat itu dinamakan kepulauan Maluku. Ketika Belanda dalam ambisinya menguasai kepulauan Banda (1621) sebagai penghasil pala sehingga berhasil mengalahkan Inggris kecuali di pulau Run, Belanda bersedia menukar pulau Run dengan sebuah pulau jajahannya di Pantai Timur benua Amerika, *New Amsterdam* yang sekarang bernama *Manhattan, New York* (Des Alwi, PT Dian Rakyat, Jakarta, 2005).

MC Ricklefs, Profesor Kehormatan Di *Monash University*, dalam buku *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*, antara lain mengatakan bahwa ketika Bartolomeu Dias mengitari Tanjung Harapan dan memasuki Samudera Hindia (1487) serta Afonso de Albuquerque merebut Malaka (1511) sebenarnya yang sedang dituju adalah "Kepulauan Rempah-rempah", nama lain dari Maluku, sebuah nama yang sesungguhnya berasal dari istilah yang diberikan para pedagang Arab untuk daerah tersebut, *Jazirat Al-Muluk*, "negeri para raja".

Segera setelah Malaka ditaklukkan dikirim misi penyelidikan yang pertama ke arah timur di bawah pim-

pinan Francisco Serrao dan berhasil mendarat di Hitu, Ambon sebelah utara pada 1512 (PT Serambi Ilmu Semesta, April 2005).

Dra.H.Maryam RL Lestaluhi, dalam bukunya Sejarah Perlawanan Masyarakat Islam Terhadap Imperialisme di Daerah Maluku, antara lain mengatakan bahwa ketika Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris silih berganti menguasai *Spice Island*, telah terjadi beberapa kali peperangan besar dengan penduduk lokal antara lain : Perang Hitu (1520-1656), Perang Banda (1609-1621), Perang Huamual (1636-1646), Perang Alaka (1625-1637), Perang Iha (1632-1651) dan Perang Tidore/Perang Nuku (1780-1805) (Penerbit PT Al-Ma'rif BAndung, 1998).

H.Maulwi Saelan, dalam bukunya Dari Revolusi '45 Sampai Kudeta '66 antara lain mengatakan bahwa ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidang ke 2 pada 19 Agustus 1945 membentuk Kabinet Presidentil dan membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi dan sekaligus memilih gubernur-gubernurannya, provinsi Maluku merupakan salah satu pembentuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) sejajar dengan provinsi-provinsi besar ketika itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Sunda Kecil (Yayasan Hak Bangsa, Jakarta 2001).

Ketika terjadi aksi separatis DI/TII dilanjutkan oleh GAM di Aceh sejak 1953 dan aksi OPM di Papua sejak 1963, Aceh dan Papua mendapatkan daerah dengan status otonomi khusus. Bagi Aceh melalui UU No.18/2001 tanggal 9 Agustus 2001, dan bagi Papua melalui UU No.21/2001 tanggal 21 November 2001. Bahkan bagi Aceh Pemerintah Indonesia harus menandatangani nota kesepahaman (*MoU*) di Helsinki Finlandia pada 15 Agustus 2005. Sedangkan ketika terjadi aksi separatis RMS di Maluku sejak 1950, RMS hanya menghasilkan stigma separatis yang berlanjut pada diskriminasi dan marjinalisasi terhadap rakyat dan daerah Maluku. Bahkan RMS menjadi polemik tentang keterlibatannya dalam konflik di Maluku yang terjadi sejak 19 Januari 1999 dan sampai hari ini sudah memasuki tahun ke-8, telah menyebabkan banyak korban yang jatuh di antara sesama rakyat Maluku.

Berbagai catatan sejarah tentang Ma-

luku memberikan pemahaman yang sangat jelas tentang betapa pentingnya Maluku pada masa lalu. Tidak hanya bagi pembentukan ke-Indonesiaan saat pembentukan NKRI, tetapi juga dalam membangun hubungan global ketika Maluku menjadi tujuan kedatangan bangsa-bangsa lain di dunia pada masa lalu. Sayangnya peran penting Maluku pada masa itu, belum sampai menghadirkan sebuah kehidupan yang sejahtera bagi rakyat Maluku saat ini. Sesuatu yang ironis memang.

Bahkan Maluku kontemporer masih menyisakan berbagai persoalan besar yang bila tidak dilola dengan benar akan tetap menimbulkan persoalan bagi terbentuknya ke-Malukuan dan ke-Indonesiaan.

Beberapa di antaranya adalah persoalan separatis yang muncul sejak 25 April 1950 dan konflik horizontal di Maluku sejak 19 Januari 1999 serta segala sebab dan akibatnya serta tentu saja berbagai potensi yang dimiliki daerah dan rakyat Maluku tetapi belum dilola secara semestinya. Karena itu perlu pendalaman terhadap berbagai persoalan dan potensi yang ada dengan melakukan telahan baik secara kuantitatif, kualitatif maupun

komparatif untuk membangun kesadaran tentang jalan terbaik yang perlu dipilih agar ke-Malukuan dan ke-Indonesiaan dapat hadir di tengah-tengah rakyat Maluku.

Bila dibandingkan dengan perjuangan bersenjata GAM dan OPM, perjuangan bersenjata RMS kemungkinan berhasil sangat kecil karena :

Pertama, wilayah aksi separatis di Papua dan Aceh merupakan pulau besar dengan daratan yang luas yang dapat digunakan sebagai daerah perlawanan sekaligus daerah penyelaman sehingga dapat menghasilkan perlawanan berlarut. Perlawanan di Aceh diawali oleh DI/TII pada 1953 dan perlawanan di Papua oleh OPM pada 1963. Perlawanan DI/TII yang dilanjutkan oleh GAM bahkan menghasilkan Undang-undang Pemerintahan Aceh yang telah disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah RI; perlawanan OPM masih terus berlangsung hingga saat ini. Bandingkan dengan wilayah aksi separatis di Maluku yang berbasis pada pulau-pulau kecil, paling besar Pulau Seram. Aksi separatis RMS yang dimulai pada 25 April 1950 berhasil diatasi dengan relatif mudah pada tahun-tahun pertama keberadaannya.

Kedua, aksi separatis di Papua dan Aceh memunculkan konflik vertikal antara sebagian rakyat Papua dan sebagian rakyat Aceh dengan Pemerintah. Sedangkan aksi yang sama di Maluku justru memunculkan konflik horizontal antara sesama rakyat Maluku, karena sebagian rakyat Maluku tidak setuju dengan ide separatis lepas dari NKRI.

Ketiga, konflik Papua dan Aceh tetap berada pada domain politik sehingga hanya menjadi konflik vertikal. Sebab rakyat Papua dan rakyat Aceh sangat menyadari bahwa yang sedang diperjuangkan oleh para separatis adalah hak politik. Khusus di Aceh, walaupun aksi separatis memunculkan juga tuntutan hak menjalankan Syariat Islam, tetapi rakyat Aceh tidak pernah mau menggeser konflik politik menjadi konflik agama. Warga non muslim di Aceh tetap tidak terusir dari Tanah Rencong. Bandingkan dengan konflik horizontal di Maluku yang telah menimbulkan korban yang demikian banyak karena aktor intelektual konflik Maluku berhasil menggeser konflik dalam domain politik menjadi konflik bernuansa agama.

Keempat, kekayaan alam Papua dan Aceh hampir seluruhnya berada di

wilayah daratan menjadikan posisi tawar rakyat Papua dan Aceh terhadap Pemerintah Pusat sangat besar. Bandingkan dengan kekayaan Maluku yang sebagian besar berada di laut - di dalam dan di bawah laut - menyebabkan penguasaan kekayaan alam Maluku tidak berada dalam tangan rakyat Maluku. Posisi tawar rakyat Maluku menjadi sangat lemah terhadap Pemerintah Pusat.

Kelima, stigmatisasi dan diskriminasi mungkin saja masih tetap berlaku pada situasi politik kontemporer saat ini sehingga tidak ada satu pun anak Maluku berada pada jabatan elit-pusat pemerintahan di Jakarta. Sangat berbeda dengan perlakuan terhadap anak negeri Papua dan Aceh. Aksi separatis sebagian rakyatnya justru meningkatkan nilai, kekuatan dan posisi tawar daerah dan tokoh masyarakatnya terhadap Pemerintah Pusat. Walaupun kekuatan bersenjata separatis di Papua dan Aceh juga relatif kecil tetapi karena ruang gerak yang luas dan sumber daya alam yang dikuasai oleh rakyat Papua dan Aceh, menjadikan aksi separatisnya mendapatkan kekuatan pengganda dari kedua faktor tersebut.

Keenam, mungkin saja ide, niat dan

aksi separatis RMS dimaksudkan untuk menaikkan nilai, kekuatan dan posisi tawar daerah dan tokoh-tokoh masyarakat tertentu asal Maluku di forum politik nasional. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Nilai, kekuatan dan posisi tawar daerah dan tokoh masyarakat Maluku di tingkat nasional malah menurun. Terkait dengan kekuatan fisik yang relatif kecil, ruang gerak aksi yang relatif sempit serta letak kekayaan alam Maluku yang relatif tidak terkuasai oleh rakyat Maluku menyebabkan semua faktor tersebut tidak dapat digunakan sebagai kekuatan pengganda terhadap perjuangan bersenjata dan perjuangan politik yang dilakukan oleh kekuatan RMS.

Ketujuh, aksi separatis RMS ternyata telah menimbulkan kecurigaan Pemerintah Pusat. Dalam menentukan kebijakan pimpinan daerah Maluku pada 1960-an sampai dengan 1990-an, Pemerintah Pusat menghindari penunjukan anak daerah Maluku sebagai Gubernur Maluku. Bahkan seperti dikatakan oleh tokoh muda Maluku, Edyson Betaubun dalam diskusi sehari tokoh masyarakat Maluku di Jakarta pada 14 Februari 2005, bahwa : *"potensi aksi separatis RMS di Maluku seringkali termanifes*

justru menjelang proses pemilihan gubernur Maluku pada masa lalu. Ada kecenderungan bahwa manifestasi tersebut adalah hasil rekayasa aparat negara. Aksi separatis RMS telah digunakan sebagai stigma dalam kehidupan perpolitikan di Maluku khususnya dalam penunjukan kepala daerah masa itu. Anak Maluku tidak dipercaya menjadi kepala daerah di "rumah" sendiri. Telah terjadi diskriminasi terhadap daerah dan rakyat Maluku hanya karena stigma RMS. Sesuatu yang ironis".

Kedelapan, perlakuan diskriminatif dari Pemerintah Pusat terhadap rakyat dan daerah Maluku terefleksikan juga melalui rumusan UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang berimplikasi pada rumusan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 18 ayat 4 UU No.32/2004 mengatakan : *kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dari 1/3 (seper-tiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Ini berarti penentuan wilayah laut bagi pro-*

vinsi Maluku yang bercorak maritim disamakan dengan pembagian wilayah laut bagi provinsi lain yang bercorak daratan seperti provinsi-provinsi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Sesuatu yang paradoks bila dibandingkan dengan perlakuan dunia internasional yang memperlakukan Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional, batas wilayah laut Indonesia ditentukan oleh garis yang menghubungkan titik-titik terluar kepulauan Indonesia, berbeda dengan batas wilayah laut bagi negara bercorak daratan. Pembagian wilayah laut yang disamakan bagi seluruh provinsi di Indonesia berdampak pada rumusan Pasal 14 UU NO.33/2004 yang mengatur tentang daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari perikanan dibagi sama-rata bagi seluruh Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Padahal Dana Bagi Hasil yang bersumber dari kehutanan dan pertambangan hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah Penghasil. Di Maluku hanya terdapat sedikit sumber minyak di bagian utara daratan pulau Seram sedangkan sebagian besar hasil tambangnya berada di bawah laut Banda berupa seng, besi, nikel, perak, emas, kobalt dan

magnesium. Maluku yang secara relatif miskin hutan dan pertambangan di daratan hanya bertumpu pada hasil laut yang justru harus dibagi rata dengan daerah lain. Rumusan yang sangat merugikan rakyat dan daerah Maluku tersebut tentu saja terkait dengan tidak adanya *bargaining power* rakyat dan daerah Maluku terhadap pembuat undang-undang. Dalam hal ini DPR RI dan Pemerintah Pusat. Terkait juga dalam hal ini adalah fanatisme kepentingan daerah yang kurang keras diperjuangkan oleh wakil-wakil rakyat daerah Maluku yang berada di DPR RI dan DPD RI.

Kesembilan, kekuatan separatis yang dituduh oleh sebagian kelompok masyarakat Maluku sebagai pihak yang merekayasa konflik Maluku telah menyebabkan terjadi konflik horizontal di Maluku. Karena itu pula telah jatuh korban yang demikian banyak; baik korban jiwa, harta benda, sarana-prasarana di daerah maupun hancurnya nilai-nilai peradaban di Maluku. Sejumlah kehancuran tersebut memerlukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, dan itu memerlukan curahan energi baru dari berbagai pihak; baik dari tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. Ketika konflik sedang

berada pada puncaknya dan karena itu memerlukan bantuan dari banyak pihak, curahan energi tersebut hanya bisa menetes. Kondisinya akan semakin memprihatinkan, bila konflik terus berlanjut, karena perhatian nasional, regional dan internasional sedang tercurah untuk membantu korban gempa-bumi dan tsunami di Aceh dan Nias, gempa bumi dan letusan gunung api di Yogyakarta dan Jawa Tengah serta gempa bumi dan tsunami di Pantai Selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Selain daripada itu, konflik di Maluku yang terjadi sejak 19 Januari 1999 telah menimbulkan dampak sbb :

Pertama, hancurnya sarana-prasarana daerah mungkin dapat segera direhabilitasi. Tetapi kehilangan nyawa dan hancurnya harta benda perorangan dapat menimbulkan dendam. Dendam yang terus berlanjut akan berakumulasi pada kehancuran nilai-nilai peradaban di Maluku. Satu kehancuran yang memerlukan waktu yang sangat panjang untuk membangunnya kembali.

Kedua, konflik yang masih tetap berlanjut walaupun hanya secara sporadis dan temporal tetapi telah “mem-

bunuh” kepastian berusaha di Maluku. Kekayaan alam Maluku yang sangat besar terutama di laut mestinya mengundang minat banyak investor. Tetapi situasi keamanan yang tidak kondusif dapat menimbulkan trauma psikis bagi pelaku bisnis di Maluku. Kehadiran investor sebagai bagian integral dari upaya penyelesaian konflik Maluku masih harus menunggu dalam waktu yang lama sampai situasi keamanan betul-betul kondusif.

Ketiga, bantuan internasional yang sering kali diterima daerah Maluku dan dapat digunakan bagi sebesar-besarnya kemaslahatan seluruh rakyat Maluku telah berkurang. Kalau pun ada, hanya diberikan bagi kelompok masyarakat tertentu. Bantuan internasional karena kubungan emosional dan komitmen sejarah masa lalu telah berkurang secara signifikan, baik dalam jumlah maupun kontribusinya terhadap nilai perekat bagi keseluruhan rakyat Maluku. Bantuan yang masih ada justru menimbulkan kesenjangan dan dapat melahirkan kecemburuan antar sesama kelompok masyarakat. Satu kondisi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melanggengkan konflik Maluku dengan menggunakan metoda manipulasi, provokasi, intimidasi dan agita-

si¹ seperti yang digunakan selama ini dalam memunculkan dan melanggengkan konflik di Maluku.

Keempat, situasi keamanan yang tidak terkendali dapat menjadi lahan subur bagi tumbuh dan terpeliharanya perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Perilaku koruptif karena kekacauan dapat digunakan untuk memanipulasi proses pembangunan justru di tengah begitu banyak dukungan anggaran pembangunan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi kehancuran. Perilaku kolusif semakin tumbuh subur karena ketiadaan aturan baku untuk menjaga keteraturan. Sedangkan perilaku nepotis karena tumbuhnya suasana primordial mendahulukan keluarga, kerabat dan kelompok sendiri. Suatu konsekuensi dari hilangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan dengan berlindung di balik berbagai kekacauan yang mungkin saja memang dipelihara oleh birokrasi lokal.

1 Manipulasi=upaya garuhi perilaku, sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain menyadarinya. Provokasi = perbuatan untuk membangkitkan kemarahan; pancingan, menghasut. Intimidasi = tindakan menakut-nakuti untuk memaksa orang lain berbuat sesuatu. Agitasi = hasutan kepada banyak orang untuk mengadakan huru-hara/pemberontakan.

Tentu saja perilaku KKN tersebut hanya akan menguntungkan oknum aparat pemerintah di daerah dan di pusat, oknum LSM lokal dan oknum tokoh masyarakat yang sering kali mengatasnamakan rakyatnya. Rakyat Maluku tetap saja menjadi pihak yang paling berkorban dan dikorbankan.

Fakta sejarah sejak abad pertengahan yang menyebabkan rakyat Maluku selalu berorientasi ke darat dan kebijakan pemerintah pusat terhadap rakyat dan daerah Maluku yang tidak proporsional telah memperkuat realitas kecenderungan perkembangan rakyat dan daerah Maluku yang sedang bergerak ke arah mengkhawatirkan. Betapa tidak. Maluku pada masa lalu yang dikenal dengan nama *Spice Island* dan *Jazirat Al-Muluk* telah menjadi obyek perebutan oleh berbagai bangsa di dunia dan pada era kemerdekaan mempunyai andil yang cukup besar dalam mendukung terciptanya NKRI, justru sesudahnya memiliki kecenderungan menuju era pemusnahan oleh diri sendiri melalui aksi separatis RMS sejak 25 April 1950 dan konflik yang terjadi sejak 19 Januari 1999. Apalagi miskinnya sumber daya alam di daratan serta diskriminasi pemerintah pusat dalam pembangunan hasil perikanan dan ku-

rangnya kemampuan teknologi untuk mengeksploitasi bahan tambang di dasar laut, berpotensi memunculkan kemiskinan bagi rakyat dan daerah Maluku. Berdasarkan hasil sensus ekonomi nasional 2004, tingkat kemiskinan di Maluku menempati peringkat ke dua (32,13%) se Indonesia, setelah Papua pada peringkat pertama (38,69%). Sesuatu yang dapat memperkuat tumbuhnya semangat dan aksi ketidakpuasan yang dapat terus berlanjut pada terjadinya kembali konflik horizontal di antara sesama rakyat Maluku dan hancurnya nilai-nilai hidup orang *basudara* di Maluku.

Karena penghancuran diri sendiri telah berlangsung begitu lama (\pm 8 tahun) dan menimbulkan korban begitu besar, hampir dapat dipastikan penyebabnya bersifat sangat multi-dimensi. Untuk menyelesaikannya tentu diperlukan satu upaya yang tidak boleh dirancang dan diimplementasikan hanya secara sporadis, segmental, temporal atau pun sektoral²⁾. Upaya seperti itu tentu membutuhkan sebuah langkah yang lebih konsepsional dan dirumuskan oleh siapa pun yang memiliki kepedulian untuk itu. Untuk kepentingan tersebut maka urun-rembuk pemikiran

merupakan wujud dari peran serta yang harus dimiliki oleh siapa pun. Apalagi bila berkaitan dengan faktor-faktor yang sangat krusial. Salah satu di antaranya bila berbicara tentang nilai-nilai hidup yang sering kali sangat subyektif. Padahal nilai-nilai hidup akan sangat mewarnai orientasi berfikir, bersikap, berbuat setiap manusia sebagai instrumen utama kehidupan. Harapannya, agar upaya penyelesaian konflik di Maluku secara permanen diawali oleh identifikasi terhadap nilai-nilai hidup yang sementara ini ada dan berkembang di Maluku. Terhadap nilai-nilai hidup yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman dapat dirumuskan nilai-nilai baru sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi untuk menghadirkan kehidupan baru di Maluku.

Nilai (*value*), seperti dikatakan oleh Clyde Kluckton dalam bukunya *Personality Innature, Society & Culture*, adalah suatu pendapat/hasil pemikiran manusia, baik sebagai individu mau-

2) Sporadis= tidak tentu, kadang kala; kadang-kadang. Segmental = bersangkutan dengan golongan/daerah tertentu. Temporal = berkenan dengan waktu tertentu. Sektoral = terbagi dalam sektor; bersektor-sektor.

pun kolektif yang bersifat otonom dan heterogen dalam upaya menyesuaikan pengaruh dari luar dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu perlu diinventarisasi nilai-nilai apa saja yang selama ini dimiliki oleh masyarakat Maluku. Dengan terjadinya konflik horizontal di Maluku, nilai-nilai apa saja yang tidak lagi valid. Setelah itu diperlukan proses penemuan nilai-nilai baru, apakah melalui proses abstraksi maupun sublimasi³⁾. Atau dalam bahasa budaya, perlu dibentuk budaya baru melalui proses akulturasi/difusi/evolusi budaya⁴⁾

Merujuk pada hasil pengamatan Gunnar Mirdall (kompas, Senin 14 November 2005), masyarakat Maluku

dapat digolongkan dalam masyarakat dengan kultur lunak. Ciri-ciri masyarakat kultur lunak menurut Gunnar Mirdall antara lain : lemah tidak kenal disiplin, tidak suka bekerja keras, permisif (mudah menerima) terhadap penyalahgunaan kekuasaan termasuk KKN, lebih banyak bicara daripada bekerja, masa bodoh terhadap tindakan melanggar hukum; sedangkan pemerintahan dan birokrasi cenderung masa bodoh, tidak proaktif, kurang peduli dan memberi peluang pada pelanggaran hukum, ikut memperkuat faham dan sikap bahwa kekuasaan adalah hak pribadi (*privilege*), hak yang memberikan beragam preferensi dan hak istimewa. Atau bila merujuk pada Teori Nilai maka, masyarakat Maluku lebih cenderung berorientasi pada nilai-nilai lahiriah yang menimbulkan sikap hedonis, vitalis, dan utilitarian yang kemudian menghasilkan perilaku pragmatisme dan machevialisme. Ke depan, keadaan seperti itu harus bisa diarahkan agar masyarakat Maluku lebih berorientasi pada nilai-nilai batiniah yang menumbuhkan perilaku dengan lebih mengutamakan nilai-nilai logika, etika, estetika dan agama.

Menghadapi era global yang demiki-

3) Abstraksi = proses menanggalkan sifat-sifat yang tidak sama dari hal atau obyek dan mengambil sifat-sifat yang sama darinya (= kristalisasi). Sublimasi=suatu mekanisme dimana impulse yang bersifat primitif diolah menjadi perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat (=aktualisasi abstraksi).

4) Difusi budaya= perubahan budaya melalui perembesan dari budaya lain. Evolusi budaya=perubahan bertahap dari satu budaya melalui pengaruh dari budaya lain. Akulturasi budaya = perubahan budaya melalui percampuran dengan budaya lain.

an kompetitif, masyarakat Maluku perlu menghadirkan perubahan ke kultur kuat yaitu kultur yang peduli, peka, kritis konstruktif dan partisipatif. Penghadiran hanya dapat dilakukan bila masyarakat Maluku mau merubah dirinya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Salah satu di antaranya adalah dengan memanfaatkan laut sebagai wahana peningkatan kesejahteraan materiel yang juga dapat berimplikasi pada terbentuknya satu karakter baru di kalangan rakyat Maluku. Sebab pada hakikatnya perilaku/kultur/budaya terbentuk sebagai hasil interaksi antara manusia dengan lingkungannya.

Urgensi Pembangunan Maluku dari Laut

Laut Maluku yang merupakan 92,4% geografi Maluku menyimpan potensi yang sangat besar; baik kuantitatif maupun kualitatif bila dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh daratan Maluku maupun bila dibandingkan dengan potensi laut di daerah lainnya di Indonesia.

Secara komparatif bila dibandingkan dengan potensi daratan Maluku maupun bila dibandingkan dengan po-

tensi laut di luar Maluku, potensi laut Maluku lebih besar. Daratan Maluku yang hanya 7,6% geografi Maluku, sangat sedikit menyimpan sumber daya alam; baik bahan tambang maupun sumber daya alam lainnya. Maluku sangat miskin sumber daya alam, walaupun hanya sekedar bila dibandingkan dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Maluku Utara, Sulawesi Utara, NTT dan NTB. Apalagi bila dibandingkan dengan Papua. Maluku hanya memiliki sedikit kandungan minyak di Bula (SBT) dan "katanya" ada batubara di Pulau Seram tetapi tidak cukup untuk dieksploitasi karena kandungan kalorinya sangat kecil dan berada dalam kawasan hutan lindung Manusela. Kondisi hutannya juga semakin kritis. Apalagi Maluku terdiri dari begitu banyak pulau-pulau kecil yang hutannya tidak boleh dieksploitasi karena akan menimbulkan kerawanan lingkungan. Bentuk permukaan tanahnya yang bergunung-gunung menyebabkan perkebunan skala besar tidak cocok di Maluku. Pala dan cengkik yang pernah menjadi primadona perdagangan antar bangsa sepanjang ratusan tahun sejak abad pertengahan seakan kehabisan nilai jual karena harganya yang demikian rendah dan hanya menjadi faktor

pendukung bagi operasional industri rokok dan industri farmasi yang justru menjadi industri utama bagi daerah lain; antara lain bagi Jawa Timur.

Bila dibandingkan dengan potensi laut di wilayah lain, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, laut Maluku menyimpan potensi yang sangat luar biasa. Hasil penelitian LIPI terhadap kandungan plankton di seluruh laut di Indonesia, menunjukkan terdapat potensi perikanan yang sangat besar di 8 wilayah laut; 3 di antaranya berada di dalam provinsi Maluku, yaitu laut Seram, laut Banda dan laut Arafuru. Hasil penelitian tersebut memberikan data bahwa potensi ikan di daerah-daerah tersebut tidak akan pernah habis dan akan tetap ada sepanjang tahun. Hasil penelitian ini mendukung pengetahuan klasik bahwa di dunia ada 8 titik tempat pertemuan arus laut yang menjadi habitat bagi kehidupan ikan tuna dan bio laut lainnya. Ikan-ikan tuna boleh melakukan migrasi untuk bertelur di tempat-tempat tertentu, tetapi setelah bertelur akan kembali ke habitat tersebut; termasuk anak ikan yang menjelang besar. Tiga laut tersebut laut Seram, laut Banda dan laut Arafura merupakan 3 diantara 8

titik pertemuan arus laut tersebut.

Sungguh mengherankan bila dengan kekayaan laut seperti itu, rakyat Maluku selama ini hanya bergantung hidupnya dari daratan. Suatu anomali (penyimpangan) perilaku yang menyebabkan kekayaan Maluku —terutama di laut— tidak dapat dieksploitasi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Maluku. Sebuah anomali yang bisa saja disengaja melalui kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak menghendaki rakyat Maluku mengeksploitasi kekayaannya karena terjadi kolusi antara Pemerintah Pusat dengan swasta nasional dan internasional. Sebuah anomali yang diperkuat oleh perilaku birokrasi lokal yang mestinya mengetahui potensi tersebut dan memiliki kewajiban untuk menyadarkan rakyat Maluku. Penyadaran tidak dilakukan karena birokrasi lokal dicurigai mendapatkan keuntungan dari anomali yang ada. Birokrasi lokal akan menikmati “komisi” dari hasil eksploitasi kekayaan laut yang dilakukan oleh swasta nasional dan internasional. Hal yang sama tidak akan diperoleh bila eksploitasi laut dilakukan oleh rakyat Maluku. Karena itu rakyat Maluku dibiarkan “tidur” di atas kekayaannya yang begitu melimpah. Bila ori-

entasi pembangunan berbasis kelautan maka program pembangunan akan menyentuh langsung kepentingan rakyat. Setiap proyek untuk membangun sarana dan prasarana kelautan akan terus berada dalam pengamatan rakyat karena menyangkut langsung hajat hidup rakyat Maluku. Peluang birokrasi untuk melakukan korupsi akan sangat terbatas. Sangat berbeda bila orientasi pembangunan tetap ke darat. Pembangunan infrastruktur di darat yang walaupun berhubungan dengan kepentingan rakyat tetapi akan kurang mendapatkan perhatian rakyat Maluku. Birokrasi Maluku akan lebih leluasa untuk melakukan manipulasi proyek. Maka sungguh tidak mengherankan bila mulai banyak proyek "mercu-suar" yang dibangun di Maluku. Keadaan ini membuktikan hasil penelitian Gunnar Myrdall bahwa yang tumbuh dan berkembang di Maluku adalah masyarakat dengan kultur lemah. Diperlukan upaya untuk membangun satu kultur yang kuat di Maluku.

Secara normatif untuk membangun sebuah kultur/budaya, masyarakat Maluku dapat melakukannya melalui proses akulturasi, difusi atau evolusi budaya berdasarkan interaksinya dengan lingkungan eksternal.

Tetapi bila ini pilihannya, proses pembentukannya akan memerlukan waktu yang sangat lama dan mungkin saja budaya yang terbentuk tidak akan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal Maluku. Bagi rakyat Maluku, sebaiknya proses tersebut untuk sementara ditinggalkan. Sebab kebutuhan mendesak bagi rakyat Maluku saat ini adalah menemukan satu budaya baru.

Fakta konflik sejak 19 Januari 1999 telah memberikan satu pemahaman yang sangat konkrit bahwa ada yang salah dalam perilaku hidup orang Maluku. Apalagi fakta konflik tersebut masih menyisakan kejadian-kejadian sporadis, walaupun konflik sudah berlangsung selama lebih dari tujuh tahun. Kajian komprehensif menunjukkan bahwa orientasi kehidupan rakyat Maluku yang lebih ke darat di tengah geografi Maluku yang 92,4% laut lah yang menjadi faktor utama pembentuk perilaku orang Maluku yang menjadi "pemusnah-sesama".

Mengutip buku Maluku Baru (Kelompok Kerja Masalah Maluku, Nov. 2002), pada awalnya suku bangsa Maluku merupakan suku bangsa pemburu (*hunter*). Hanya saja kehadiran

bangsa pendatang (Arab, Portugis dan Belanda) disertai kebutuhan akan hasil-hasil pertanian telah menumbuhkan dan memantapkan satu orientasi kehidupan suku bangsa Maluku yang bertumpu pada bidang pertanian/perkebunan. Akibatnya dalam satu jangka waktu yang panjang suku bangsa Maluku selalu menggantungkan hidupnya pada wilayah daratan; bukan pada wilayah lautan. Orientasi ke wilayah daratan mungkin juga disebabkan oleh karena kondisi perairan Maluku yang relatif ganas karena kedalaman dan keluasannya. Sehingga tanpa teknologi yang memadai pada waktu itu, laut menjadi sulit dimanfaatkan.

Orientasi sedikit berubah, ketika Belanda dalam rangka memantapkan penjajahannya dan memanfaatkan secara maksimal tenaga untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya rempah-rempah bagi kepentingannya, memaksa rakyat Maluku yang tadinya berdiam di wilayah pegunungan/pedalaman untuk secara berangsur-angsur turun ke wilayah pesisir. Proses relokasi pemukiman ini yang mulai dilakukan pada pertengahan abad ke-17 hanya sedikit merubah orientasi kehidupan masyarakat Maluku yang tetap berorientasi ke daratan.

Orientasi kehidupan ke daratan telah melahirkan kondisi emosi/psikologis (aspek afektif), kondisi rasio/logika (aspek kognitif) dan kondisi sikap dan perilaku (aspek kultur/budaya) masyarakat Maluku yang dapat dipetakan sebagai berikut :

Pertama, tanah yang subur sebagai prasarana utama penghidupan rakyat telah melahirkan sikap dan perilaku yang tidak terbiasa menghadapi tantangan alam. Tantangan hidup yang kurang, menjadi semakin lengkap karena pengolahan tanah telah menghasilkan komoditi ekonomi yang diperbutkan di pasar perdagangan antar bangsa, berupa pala dan cengkih. Apalagi komoditas tersebut dihasilkan oleh tanaman keras yang upaya penanaman dan pemeliharaannya tidak serumit dan sekeras bila harus menanam tanaman yang lain. Bandingkan dengan penduduk yang menggantungkan hidupnya dari bersawah; yang masih memerlukan upaya keras untuk membajak tanah, menanam, mengairi, menyiangi, menetam, menumbuk/menggiling, baru dapat diperoleh beras yang dapat dikonsumsi atau diperdagangkan. Apalagi upaya keras tersebut harus dilakukan secara berulang pada setiap kali musim tanam. Sedangkan pala dan ceng-

kih hanya dengan sekali tanam dapat dipetik hasilnya secara turun-temurun dan tidak memerlukan upaya pemeliharaan yang terlalu berat. Akibatnya walaupun sama-sama bergantung hidupnya dari mengelola tanah, tetapi sikap dan perilaku suku bangsa Maluku relatif tidak ulet.

Kedua, penggantungan kehidupan pada tanaman keras (pala dan cengkih) juga menumbuhkan sikap dan perilaku individualistis dan tidak komunal. Bandingkan bila harus mengolah sawah yang memerlukan kerjasama dengan orang lain setidaknya untuk memelihara sistem pembagian air yang kemudian melahirkan sikap dan perilaku gotong-royong. Pada masyarakat Maluku memang ada *masohi*, tetapi *masohi* tidak dapat disamakan dengan gotong-royong karena *masohi* lebih ditujukan pada pekerjaan bersama untuk kepentingan individu. Sedangkan gotong-royong lebih ditujukan pada pekerjaan bersama untuk kepentingan bersama; walaupun ada juga untuk kepentingan individu. Untuk itulah setiap kali ada *masohi*, diperlukan permintaan dari individu yang memerlukan dan sebagai konsekuensinya yang bersangkutan harus menyediakan berbagai fasilitas kepada seluruh peserta *masohi*.

Ketiga, orientasi hidup pada tanah dan keadaan laut yang luas, dalam dan ganas telah membangun isolasi di antara masyarakat Maluku. Apalagi keadaan daratan juga bergunung-gunung yang sangat membatasi mobilitas penduduk. Ditambah dengan penggantungan hidup pada tanah dengan komoditas yang memberikan hasil yang sangat besar, membentuk sikap statis yang melahirkan perilaku tidak dinamis, tidak inovatif/kreatif. Pada ujung-ujungnya tidak rasional, tidak inklusif dan dapat menolak pluralitas. Fakta menunjukkan bahwa suku bangsa Maluku di luar Maluku seringkali hidup secara eksklusif, bahkan dalam komunitas Kampung Ambon (*Ambon Camp*).

Keempat, kemudahan yang diberikan oleh alam diperparah oleh perlakuan lebih terpakai oleh Belanda yang melahirkan sikap dan perilaku selalu ingin hidup enak tanpa perlu kerja keras, ingin berhura-hura, senang pesta dan lain-lain yang berimplikasi pada sikap untuk selalu menempuh jalan pintas, tidak kompetitif dan selalu bersikap reaktif/emosional terhadap lingkungan.

Kelima, kemudahan hidup yang diberikan oleh alam dan melahirkan

sikap individualistis, berimplikasi pada tumbuhnya sikap dan perilaku primordial sempit, melihat keunggulan orang lain sebagai sesuatu yang harus dihancurkan (perilaku katang⁵⁾) dan tumbuhnya sikap arogansi yang berlebihan bahkan dalam keadaan yang tidak berdaya sekali pun (perilaku tuturuga⁶⁾).

Keenam, kemudahan yang diberikan oleh alam menyebabkan masyarakat Maluku memiliki banyak waktu luang. Ditambah dengan keindahan alam, baik panoramanya maupun simphoni alam berupa perpaduan antara deburan ombak, gesekan nyiur melambai dan kicauan floranya telah melahirkan dan menumbuhkan jiwa seni yang kuat di kalangan masyarakat Maluku. Jiwa seni di samping dapat menumbuhkan kehalus-

an budi pekerti, kepekaan nurani dan rasa empati/solidaritas juga dapat membentuk sikap dan perilaku emosional-temperamental. Keadaan menjadi lebih parah karena jiwa seni yang berkembang di Maluku adalah seni suara yang memberikan kontribusi pada tumbuh dan berkembangnya sikap dan perilaku oral/verbal. Akibatnya manusia Maluku lebih senang berbicara daripada menulis atau berkarya. Kalau pun ada seni lain berupa seni tari, itu pun dalam bentuk tari cakalele yang mengeksploitasi watak perang. Watak perang ini merupakan sisa kehidupan masyarakat Maluku yang merupakan suku bangsa pemburu, sebelum berubah orientasinya menjadi suku bangsa petani. Apalagi watak itu tetap terpelihara oleh suasana konflik yang begitu lama di Maluku sepanjang sejarah peradabannya. Dalam suasana kontemporer saat ini, barangkali tari ini pula telah memberikan kontribusi dalam konflik di Maluku, dalam bentuk seperti masyarakat Maluku sangat "menikmati" konflik yang sedang berlangsung. Memang dalam perspektif lain tari cakalele telah menumbuhkan juga sikap masyarakat Maluku yang sangat menyukai kehidupan militer.

5) Katang=kepiting adalah sejenis binatang yang apabila ditempatkan secara berkelompok dalam satu ember maka akan terjadi perilaku saling menjatuhkan; bila ada yang berusaha untuk naik ke permukaan ember maka yang berada di bawahnya akan menarik yang sudah lebih dulu berada di atasnya.

6) Tuturuga=kura-kura adalah sejenis binatang yang walaupun sudah terlentang atau tidak berdaya, tetapi kedua kaki bagian depan akan tetap menepuk-nepuk dada.

Untuk mengubah orientasi dan dampak yang ditimbulkan diperlukan reorientasi dari semula titik berat ke daratan menjadi titik berat ke lautan. Seperti yang dikatakan dalam Maluku Baru, reorientasi mengandung konsekuensi untuk :

Pertama, merubah persepsi masyarakat Maluku yang semula menggantungkan sebagian besar hidupnya pada tanah menjadi pada laut.

Kedua, menyosialisasikan betapa kayanya sumber daya laut wilayah Maluku, baik kehidupan hayati maupun pertambangan bawah lautnya.

Ketiga, menyesuaikan program pembangunan dari tadinya berorientasi agraris menjadi berorientasi maritim, walaupun untuk itu pembangunan kelautan harus dimulai dari darat, karena diperlukan sarana prasarana pendukung di darat; penyesuaian program pembangunan harus berjalan simultan dengan perubahan sikap mental birokrasi agar dapat berorientasi pada pembangunan kelautan.

Keempat, membuka isolasi alam terhadap masyarakat Maluku dengan membangun sarana dan prasarana perhubungan laut (pelabuhan dan

kapal angkut) dan perhubungan darat (prasarana jalan darat).

Kelima, menyiapkan sikap mental masyarakat Maluku terhadap kemungkinan terjadinya *cultural-shock* (guncangan budaya) karena terjadi perubahan dari masyarakat pemburu dan petani ke masyarakat industri (antara lain melalui pengolahan hasil laut) yang pluralis, inklusif, dinamis, demokratis dan egaliter.

Kini rakyat Maluku harus memanfaatkan sebesar-besarnya laut Maluku tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan materielnya tetapi juga untuk membentuk satu budaya baru di Maluku. Pemanfaatan kekayaan laut Maluku tidak hanya sebagai wahana lapangan kerja untuk peningkatan kesejahteraan materiel, tetapi juga sebagai wahana untuk membentuk satu karakter baru yang pada gilirannya akan membangun satu budaya baru.

Betapa tidak. Reorientasi yang menumbuhkan keberanian untuk mengeksploitasi laut akan melahirkan manusia Maluku yang jauh lebih kompetitif. Keadaan laut Maluku yang luas dan dalam serta pada musim tertentu sangat ganas memerlukan

keuletan, kebersamaan, kecerdasan dan penguasaan teknologi untuk menaklukkannya. Keadaan ini akan membangun kondisi emosional, psikologis, intelektual dan kepribadian yang positif dalam menghadapi tantangan zaman. Di samping itu pemanfaatan kekayaan laut dalam bentuk mengonsumsi hasil laut akan membentuk manusia cerdas. Karena kandungan Omega-3 yang berada pada hasil laut yang dikonsumsi. Bangsa Jepang, Korea, Taiwan dan China yang memiliki kebiasaan mengonsumsi ikan telah terkenal sebagai bangsa yang cerdas. Ironisnya ikan yang dikonsumsi justru sebagian besar berasal dari perairan laut dalam di Maluku.

Di samping itu interaksi di tengah laut akan dapat mereduksi sikap primordial keagamaan orang Maluku karena adanya segregasi pemukiman berdasarkan perbedaan agama di desa-desa adat di seluruh Maluku.

Tentu saja reorientasi ini memerlukan perjuangan yang tidak ringan. Karena tidak hanya diperlukan upaya keras untuk merubah sikap mental masyarakat Maluku tetapi juga bagaimana membangun *political-will* Pemerintah Pusat di Jakarta agar mau

memberikan hak kepada masyarakat Maluku mengelola secara penuh laut Maluku. Pemerintah Pusat di Jakarta perlu memberikan sejenis otonomi khusus kelautan kepada rakyat Maluku. Sama seperti pemberian otonomi khusus kepada rakyat Aceh dan Papua.

Memang kebutuhan akan reorientasi telah mulai menggerakkan keinginan untuk merubah paradigma pembangunan di Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku telah memprakarsai pembentukan Forum Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan yang dideklarasikan di Ambon, pada 10 Agustus 2005.

Forum tersebut melibatkan 7 Provinsi kepulauan yaitu Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, NTT, NTB, Kepulauan Bangka-Belitung dan Kepulauan Riau. Sebuah prakarsa yang sudah jauh lebih maju daripada hanya sekedar bersandar pada konsep Pembangunan gugus Pulau, yang pada era otonomi daerah saat itu mengalami kesulitan untuk diimplementasikan. Sebab dengan titik berat otonomi di tingkat kabupaten/kota maka konsep Gugus Pulau yang lintas kabupaten/kota memerlukan peninjauan ulang atau setidaknya tidaknya

memerlukan koordinasi antar kabupaten/kota yang lebih intensif atau bila harus tetap dilaksanakan, diperlukan pembentukan badan otoritas baru yang memiliki wewenang lintas kabupaten/kota.

Semestinya pembentukan forum Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan dimaksudkan untuk mengagregasi kekuatan tawar dari 7 provinsi kepulauan untuk dihadapkan kepada Pemerintah Pusat. Dengan begitu diharapkan ada perlakuan berbeda dari Pemerintah Pusat dibandingkan dengan Provinsi yang sebagian besar wilayahnya merupakan daratan. Akan ada penambahan alokasi anggaran pembangunan melalui penambahan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam utamanya sumber daya alam perikanan karena keluasan laut dijadikan salah satu aktor penghitung (*variable*) dalam penyusunan anggaran nasional.

Tetapi di tengah-tengah anggaran negara yang masih terbatas dan masih bergantung pada hutang luar negeri maka upaya memperjuangkan bersama satu tambahan anggaran akan mengalami hambatan/kendala.

Sebab dengan 7 provinsi menuntut

secara bersama maka alokasi anggaran yang akan diberikan oleh Pemerintah Pusat pasti akan besar dibandingkan dengan bila yang menuntut hanya 1 provinsi. Dalam hal ini Provinsi Maluku memiliki peluang dan justifikasi berjuang sendirian untuk mendapatkan perlakuan khusus sebagai provinsi yang sebagian besar geografinya terdiri dari laut. Karena dengan 92,4% wilayahnya berupa laut, wilayah lautnya lebih luas dari 6 provinsi lainnya yang ada dalam Forum Kerjasama. Apalagi bila dibandingkan dengan 6 provinsi tersebut, Provinsi Maluku sangat miskin sumber daya alam di daratan. Mestinya Provinsi Maluku berani berjuang sendirian untuk mendapatkan hak lebih dalam mengelola lautnya. Dan berani untuk memunculkan sebuah spesifikasi baru penamaan provinsi dengan nama Provinsi Kelautan; bukan dengan nama Provinsi Kepulauan. Menggunakan nama Provinsi Kelautan, tidak hanya bermakna untuk meningkatkan perhatian Pemerintah Pusat, tetapi juga, dan yang lebih penting adalah sebagai faktor penggerak motivasi bagi rakyat Maluku untuk lebih "menengok" ke laut. Dengan peningkatan motivasi, rakyat Maluku akan tergerak untuk bertindak sebagai subyek pempa-

ngunan kelautan di Maluku. Dalam kondisi seperti itu, Provinsi Maluku tidak lagi hanya bergantung kepada tambahan alokasi anggaran bagi Provinsi Kepulauan seperti yang ingin diperjuangkan melalui pembantuan Forum Kerjasama 7 Provinsi Kepulauan. Dengan nama Provinsi Kelautan, Maluku sudah bisa disejajarkan dengan Provinsi Aceh dan Papua yang telah mendapatkan status sebagai daerah otonomi khusus.

Bila konsep ini berhasil diperjuangkan dan Pemerintah Pusat berkenan merestui rakyat Maluku untuk mengelola lautnya secara maksimal, maka manfaatnya tidak hanya untuk rakyat Maluku tetapi juga untuk membentuk ke-Indonesiaan rakyat Maluku. Bagi rakyat Maluku, pengelolaan laut yang optimal akan meningkatkan kesejahteraan materiil rakyat Maluku dan terbentuknya karakter baru yang lebih inklusif, egaliter, pluralis, dinamis dan demokratis serta terbentuknya manusia Maluku yang lebih cerdas. Bagi ke-Indonesiaan akan terbangun sebuah sikap yang nasionalis sebagai faktor pereduksi terhadap masih adanya ide separatisme dan fundamentalisme radikal yang saling berhadapan di Maluku. Sebab nasionalisme atau wawasan kebangsaan

sering kali terbangun bila tidak ada kemiskinan, kemelaratan dan kebodohan. Apalagi interaksi di laut akan menghindarkan rakyat Maluku dari komunikasi sektarian di daratan karena adanya segregasi pemukiman berdasarkan agama di desa-desa adat di kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.

Penutup

“Bangunlah Maluku dari laut” merupakan sebuah ajakan kepada semua komponen pemerintah dan masyarakat; baik kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah; kepada pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif; kepada elit masyarakat maupun masyarakat biasa; kepada pengusaha nasional maupun lokal.

“Bangunlah Maluku dari laut”, bukan berarti hanya membangun di laut, tetapi membangun Maluku dari laut mengandung juga pengertian untuk membangun infra struktur di daratan Maluku, utamanya di wilayah pusat pertumbuhan baru ekonomi kelautan.

Membangun Maluku dari laut merupakan sebuah keniscayaan. Tidak hanya karena keadaan geografisnya

yang 92,4% laut tetapi berbagai permasalahan sosial yang selama ini ada di Maluku memerlukan reorientasi pembangunan untuk menghasilkan manusia Maluku yang mestinya bisa lebih berkualitas.

Membangun Maluku dari laut tidak hanya beraspek ekonomi, untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan materiel tetapi juga untuk menciptakan sebuah budaya baru di Maluku. Sebab dengan mengelola laut akan tumbuh sebuah karakter baru yang ulet, bersemangat, komunikatif, inovatif, kreatif, produktif dan menghargai kemajemukan (pluralis).

Membangun Maluku dari laut akan mereduksi sikap dan perilaku orang Maluku yang sektarian-primordial akibat adanya sekat-sekat pemukiman antar desa adat yang segregatif berdasarkan perbedaan agama.

Membangun Maluku dari laut akan memberikan peluang kepada orang Maluku untuk mengonsumsi hasil

laut yang kaya Omega-3 sehingga dapat melahirkan manusia Maluku yang lebih cerdas.

Membangun Maluku dari laut akan membentuk manusia Maluku yang paripurna; yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional; sebuah kecerdasan yang dapat membentuk kemampuan untuk membangun nasionalisme di kalangan orang Maluku dan menjadikan orang Maluku lebih kompetitif.

Membangun Maluku dari laut merupakan jawaban konkrit terhadap hipotesa yang disampaikan Presiden RI, DR.Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik PBB dengan mengatakan bahwa martabat manusia tidak lagi hanya cukup dipenuhi dengan kemerdekaan dan kebebasan; martabat manusia seutuhnya hanya dapat dipenuhi jika manusia bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, serangan penyakit, sikap tidak toleran dan konflik.□